

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45.440/759/ORG/XII/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 188.45-
823/ORG/XII-2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021**

**RENSTRA
SEKRETARIAT
DAERAH KOTA
BUKITTINGGI
TAHUN 2016-2021**



**Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kota Bukittinggi**





PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kesuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Telp. (0752) 33369, 21879 Faks. (0752) 32767

Website : www.bukittinggikota.go.id Kode Pos : 26129

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45-759/Org/XII-2017

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR
188.45-823/Org/XII-2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT
DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Nomor 188.45- 2016 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 'a' di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Perubahan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Nomor 188.45-823-2016 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;

Kedua : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Nomor 188.45- -2016 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the Bukittinggi Regional Government (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI" around the perimeter and "SETDA" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name "YUEN KARNOVA" is printed in bold capital letters.

YUEN KARNOVA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah selama lima tahun. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

Sehubungan dengan perubahan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Keberadaan Renstra merupakan operasional dari RPJMD ditingkat SKPD untuk menjalankan urusan, ataupun pendukung urusan.

Kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, fasilitasi serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Renstra Sekretaria Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021. Semoga keberadaan dokumen ini memberi manfaat dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



YUEN KARNOVA

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IV
BAB I PENDAHULUAN	6
1. Latar Belakang	6
2. Landasan Hukum	7
3. Maksud dan Tujuan	7
4. Sistematika.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH.....	10
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2. Sumber Daya Sekretariat Daerah	12
3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	14
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH.....	26
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat daerah.....	26
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	27
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota.....	30
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah & KLHS RPJMD.....	31
5. Penentuan Isu-isu Strategis	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	34
1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah	34
2. Indikator Kinerja Utama.....	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
BAB VIII PENUTUP.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) merupakan dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah. Penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra SKPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam mengimplementasikan proses penyusunan Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder dalam mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan dan akuntabel. Tanpa perencanaan strategis yang baik maka instansi pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai tujuannya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Permendagri yang baru tercantum beberapa perubahan dalam teknis penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD, renja SKPD, serta RKPD sehingga diperlukan kecermatan dan ketelitian dalam melaksanakan peraturan baru tersebut.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.
5. Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis SKPD

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi dimaksudkan untuk menjamin adanya suatu keterkaitan dengan RPJMD dalam setiap perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun selama 5 (lima) tahun kedepan oleh Bagian-bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi. antara memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan sasaran berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bukittinggi dengan Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi.

2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bukittinggi, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.
5. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan, antar bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah.

1.4. Sistematika

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai latar belakang, Landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

Memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan renstra K/L dan Resntra Provinsi/Kab/Kota, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS RPJMD serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran memuat penjelasan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah dan hubungan Tujuan dan sasaran Perangkat daerah dengan Tujuan Sasaran RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat penjelasan tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rancangan Awal RPJMD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Prangka Daerah

Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah sebagai berikut :

2.1.1. Tugas

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2.1.2. Fungsi

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

A. Sekretaris Daerah;

Sekretaris Daerah memiliki 3 (tiga) Asisten, yaitu:

1. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :
 - a) Bagian Pemerintahan, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - 2). Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;
 - 3). Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Dalam dan Luar Negeri.
 - b) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan :
 - 1). Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
 - 2). Sub Bagian Bina Lembaga Sosial Kemasyarakatan;
 - 3). Sub Bagian Keagamaan dan Kerukunan Umat
 - c) Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - 2). Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 3). Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
2. Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan, yang membawahi :
 - a) Bagian Perekonomian, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian;
 - 2). Sub Bagian Bina Produksi dan Pemasaran;
 - 3). Sub Bagian Kelembagaan dan Pemberdayaan Ekonomi.
 - b) Bagian Pembangunan, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Fasilitasi Pembangunan;
 - 2). Sub Bagian Informasi Data dan Pelaporan;
 - 3). Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.
 - c) Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi:
 - 1). Sub Bagian Pemberitaan dan Penyajian Data;
 - 2). Sub Bagian Kemitraan, Pers dan Media;

- 3). Sub Bagian Dokumentasi.
3. Asisten Administrasi Umum, yang membawahi :
 - a) Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Protokoler;
 - 2). Sub Bagian Rumah Tangga dan Pemeliharaan;
 - 3). Sub Bagian Pengadaan dan Inventarisasi.
 - b) Bagian Keuangan, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Perencanaan Keuangan;
 - 2). Sub Bagian Penatausahaan Keuangan;
 - 3). Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
 - c) Bagian Organisasi, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Kelembagaan;
 - 2). Sub Bagian Tatalaksana;
 - 3). Sub Bagian Aparatur dan Evaluasi Kinerja.

B. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2. Sumber Daya Prangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi memiliki pegawai sebanyak 141 orang. Jumlah pegawai eselon II sebanyak 4 orang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Pemerintahan Umum, Asisten Administrasi Umum, Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. Eselon III dan IV masingmasing sebanyak 9 orang dan 27 orang yaitu para kepala bagian, dan kepala subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi.

Berdasarkan golongan struktur ASN pada Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi seperti terlihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.1

**PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN
GOLONGAN**

NO.	GOLONGAN	JUMLAH	%
1.	Golongan I	1	1,0
2.	Golongan II	36	26,0
3.	Golongan III	86	61
4.	Golongan IV	18	13
	Jumlah	141	100

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa ASN dengan Golongan III merupakan jumlah yang terbanyak dibandingkan dengan golongan lainnya. Dengan data tersebut menggambarkan bahwa ASN di sekretariat Daerah Kota Bukittinggi cukup mempunyai kompetensi yang memadai.

Berdasarkan tingkat Pendidikan, komposisi ASN yang terdapat di Sekretariat daerah Kota Bukittinggi terlihata sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 2.2

**PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN**

NO.	GOLONGAN	JUMLAH	%
1.	SD	1	1,0
2.	SLTP	1	1,0
3.	SLTA	38	27
4.	Diploma III	22	16
5.	Diploma IV	1	1,0

NO.	GOLONGAN	JUMLAH	%
6.	S1	64	46
6.	S2	14	10
7.	S3	0	0
	Jumlah	141	100

Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan ASN di Sekretariat Daerah yang terbesar adalah berkualifikasi S1, yaitu sebanyak 64 orang (46%) dan masih terdapat ASN yang belum berkualifikasi sarjanadengan jumlah yang cukup besar yaitu 40 orang.

2.3. Kinerja Pelayanan Prangkat daerah

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi titik penting dan utama sebagai tujuan akhir dari keseluruhan reformasi administrasi pemerintahan. Kualitas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah sampai saat ini masih perlu ditingkatkan, karena masih adanya pengaduan dan keluhan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan tersebut. Sebab itu, kinerja pelayanan publik menjadi titik strategis dimana kepercayaan masyarakat secara luas kepada pemerintah dipertaruhkan. Karena itu prestasi Kinerja Pelayanan Umum Sekretariat Daerah merupakan salah satu dari sekian satuan kerja Pemerintah Daerah yang menjadi ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai administrator dan fasilitator yang efisien, efektif, transparan dan akun tabel, Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi berupaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan cara melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai visi dan misi Sekretariat Daerah dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam menyusun dan mengkoordinasikannya dengan Dinas/ Badan dan Lembaga Teknis Daerah lainnya.

Untuk mendukung visi dan misi dimaksud, diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari :

1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum, Hukum dan HAM, kesejahteraan rakyat, perekonomian, pembangunan, hubungan masyarakat, organisasi , keuangan dan Umum.
2. Penyelenggaraan Koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pada lingkup sekretariat daerah.
3. Melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD
4. Pelayanan teknis administratif Kepala Daerah dan seluruh SKPD di Lingkup Pemerintah Kota Buittinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Sekretariat Daerah terhadap indikator kinerja Periode Renstra Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL .2.3**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi**

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada tahun ke-		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	% dunia usaha untuk penyaluran CSR				100%	100%		114%	119%		132%	119%	
2	% urusan dalam kelembagaan yang tepat (indeks efektifitas kelembagaan pemerintah)				80%	100%		80%	81%		100%	81%	
3	% SKPD memiliki SOP yang efektif				100%	100%		100%	100%		100%	100%	
4	% SKPD memiliki IKM bernilai baik				80%	100%		100%	100%		125%	100%	
5	% aparatur berkinerja baik				3%			45%			1500%		
6	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja				11 Bank	12 bank		6 Bank	7 bank		54,55%	58%	
7	Nilai EKPPD				8 Lembaga	10 lembaga		5 Lembaga	5 Lembaga		62,50%	50%	
8	Nilai TEPPRA						1,5			1,58%			105
9	% kasus pelanggaran HAM dalam Penyelenggaraan Pemerintahan						B			B			100
10	% Produk Hukum yang di Implementasikan						<0,3			0,329			109
11	% Informasi yang direspon						3,75			5,48			68

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada tahun ke-		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	% sektor ekonomi yang bertumbuh sesuai dengan target												
13	% rata-rata kenaikan harga komoditi indikator inflasi												
14	% institusi pengelola urusan keagamaan yang selaras dengan program pembangunan kota												

Berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja sasaran yang terlihat dari indikator kinerja sasaran, selama periode Renstra Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2015 terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang belum berkualifikasi baik sampai akhir masa Renstra Tahun 2016, yaitu:

1. Jumlah perbankan Syari'ah belum sesuai target kinerja sasaran, karena indikator ini terkait erat dengan lembaga di luar kewenangan pemerintah Kota Bukittinggi, namun upaya untuk mendorong perbankan membentuk cabang syari'ah terus diupayakan.
2. Persentase lembaga keuangan mikro berbasis syari'ah juga masih dibawah target, karena perizinan ini terkait dengan kewenangan otoritas jasa keuangan dan terjadinya kenaikan standar dari OJK
3. Angka kemiskinan juga masih relatif tinggi dari yang ditargetkan, karena itu akan menjadi rekomendasi bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bukittinggi, dimana Sekretariat Daerah merupakan salah satu Kelompok Kerja.

Untuk realisasi anggaran pendukung Renstra Tahun 2010 – 2015 yang belum maksimal terjadi pada tahun 2013 dengan capaian serapan anggaran 74%, hal ini terjadi karena beberapa program kegiatan yang memiliki anggaran relatif besar tidak dapat direalisasikan, terutama kebijakan pengunduran pemilihan kepala daerah, sehingga anggaran untuk pengadaan fasilitas bagi kepala daerah yang baru ditunda pengadaannya..

Pencapaian kinerja periode Renstra Tahun 2010 – 2015 dicapai dengan dukungan anggaran dengan realisasi seperti tabel berikut:

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.137.434.100	6.359.709.500	7.070.982.994	7.285.903.500	7.912.525.200	4.289.089.700	5.086.754.787	6.083.328.752	6.714.082.039	7.316.595.480	83,49	79,98	86,03	92,15	92,47		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	990.500.000	3.432.700.000	3.442.296.000	3.485.055.000	6.134.000.000	810.043.461	3.096.551.543	2.717.961.061	2.528.512.714	5.339.369.312	81,78	90,21	78,96	72,55	87,05		
Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	49.976.000	72.463.000	137.198.250	181.750.400	221.685.620	35.834.200	62.476.766	109.000.603	145.312.015	196.816.960	71,70	86,22	79,45	79,95	88,78		
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah	6.460.441.000	7.724.500.000	8.890.150.000	9.823.100.000	12.265.500.000	5.105.111.792	5.530.838.020	6.905.242.807	8.403.362.426	10.738.822.208	79,02	71,60	77,67	85,55	87,55		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	10.922.500	48.028.900	41.948.650			-	37.994.700	36.223.200			0,00	79,11	86,35				
Program Peningkatan Sistim Pegawai Internal dan Pengendalian Pelaksana Kebijakan KDH	30.650.000	21.035.000	30.910.000			25.714.290	14.102.300	19.157.300			83,90	67,04	61,98				
Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	225.375.000	213.610.950	72.531.000	170.022.500	176.162.500	47.332.000	94.005.400	40.740.050	51.832.500	51.798.550	21,00	44,01	56,17	30,49	29,40		
Program Penataan peraturan perundang-undangan	676.494.600	947.788.750	716.205.450	674.242.300	1.128.907.450	438.598.700	681.647.055	450.595.875	471.566.754	826.326.913	64,83	71,92	62,91	69,94	73,20		
Program Peningkatan pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat	182.694.900	5.045.300	9.975.000			162.559.962	3.004.700	6.891.760			88,98	59,55	69,09				
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	711.452.750	551.898.600	602.526.850	961.319.200	809.414.463	587.079.500	438.520.419	527.037.635	654.986.729	537.359.103	82,52	79,46	87,47	68,13	66,39		
Program Peningkatan Bidang Perekonomian Pengentasan Kemiskinan Investasi	94.014.500	3.080.647.865	3.238.149.650	42.674.250		64.804.500	2.790.955.969	1.576.205.698	32.746.820		68,93	90,60	48,68	76,74	#DIV/0!		
Program pengelolaan administrasi pembangunan	10.649.800	1.095.830.400	725.335.850	1.169.954.408	544.088.000	2.094.000	823.511.682	500.573.464	1.017.484.287	437.144.252	19,66	75,15	69,01	86,97	80,34		
Program pembinaan dan pengembangan aparatur	95.098.150	191.848.000	72.175.000	218.852.100	179.014.500	52.914.600	182.020.200	69.500.500	209.116.700	158.295.806	55,64	94,88	96,29	95,55	88,43		
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	1.161.572.500	1.000.000.000	182.520.500	435.561.400		633.857.680	56.243.409	35.673.050	76.875.150		54,57	5,62	19,54	17,65			
Program peningkatan promosi dan	168.985.500										82,23						

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
kerjasama investasi						138.959.100											
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	36.033.700	187.525.000	131.700.500			25.511.040	125.465.018	61.709.750			70,80	66,91	46,86				
Program peningkatan pemahaman pengalaman kehidupan beragama masyarakat	2.830.461.000	4.771.514.000	3.477.558.350	4.761.886.400	5.589.373.100	2.102.841.400	2.994.752.111	2.703.953.735	3.907.796.900	4.433.870.889	74,29	62,76	77,75	82,06	79,33		
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	297.572.000	102.853.250	361.292.700	123.577.400	374.306.200	175.327.000	22.376.763	277.453.650	92.008.150	276.535.534	58,92	21,76	76,79	74,45	73,88		
Program kerjasama informasi dengan media	1.339.774.000	1.352.302.700	2.284.595.000	2.396.934.100		1.017.272.000	759.625.800	1.476.713.400	1.738.445.440		75,93	56,17	64,64	72,53			
Program peningkatan disiplin Aparatur		167.676.900	70.000.000				154.306.400	60.500.000				92,03	86,43				
Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		105.183.950	70.144.500	615.000			81.448.550	69.289.600	615.000			77,43	98,78	100,00			
Program Penataan Penguasaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		156.290.000	114.438.000	146.828.500			10.296.960	47.665.690	3.301.000			6,59	41,65	2,25			
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi		5.918.000	13.778.500	13.757.300	24.463.100		781.500	5.467.400	10.007.300	17.059.600		13,21	39,68	72,74	69,74		
Program Peningkatan profesionalisme dan SDM Aparatur			31.300.000					2.821.000					9,01				
Program peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur			49.595.900	49.019.000				44.855.200	44.990.900				90,44	91,78			
Program Pengembangan Potensi Ekonomi			23.180.000	50.000.000	74.150.000			20.225.200	48.635.950	67.329.030			87,25	97,27	90,80		
Program pengelolaan stabilitas perekonomian			38.348.500	99.769.000	84.700.000			29.995.300	89.981.600	82.358.680			78,22	90,19	97,24		
Program pengembangan sistem informasi pertanahan			24.571.750	25.248.400				10.947.800	9.122.000				44,55	36,13			
Program peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah				52.500.000	52.500.000				46.305.550	50.773.250				88,20	96,71		
Program peningkatan kinerja perangkat daerah				78.821.000					48.199.400					61,15			
Program penataan kelembagan perangkat daerah				44.785.000					41.704.800					93,12			
Peningkatan kompetensi aparatur dan masyarakat dalam bidang keagamaan				150.500.000					68.087.600					45,24			
Program penanggulangan kemiskinan				27.598.000					1.495.000	5.975.450				5,42	45,97		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
dan kesejahteraan sosial					13.000.000												
program peningkatan pengentasan kemiskinan					75.195.000					68.016.700					90,45		
program penataan sistem manajemen sumber daya aparatur					57.767.000					42.841.482					74,16		
program penataan organisasi perangkat daerah					263.395.000					216.440.938					82,17		
program penegasan batas wilayah					155.985.500					16.868.800					10,81		
program kerjasama informasi dengan mass media					2.268.998.000					1.722.970.035					75,94		
	20.510.102.000	31.594.370.065	31.923.408.894	32.470.274.158	38.405.130.633	15.714.944.925	23.047.680.052	23.889.729.480	26.456.574.724	32.603.568.972							

Tahun 2012 : 76% Tahun 2013 : 72% Tahun 2014 : 74% Tahun 2015 : 81% Tahun 2016 : 84%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Prangkat Daerah

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang teramat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan.

Lingkungan internal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan cenderung di luar kendali.

1. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan Internal mencakup struktur organisasi, komunikasi antar bagian dalam organisasi dan sumber daya yang semuanya akan mendukung kelangsungan hidup organisasi. Dengan melakukan analisa lingkungan internal melalui penerapan metoda analisis SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities dan Threats), akan membantu organisasi untuk mengoptimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan secara internal, kekuatan dan kelemahan tersebut akan dijadikan alat untuk meraih peluang serta menghindari ancaman.

a. Analisis Kekuatan (Strength)

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan strategik dalam mencapai visi dan misi. Kekuatan Sekretariat Daerah adalah :

- a. Merupakan SKPD yang mempunyai fungsi Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS)Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS)
- b. Sarana dan Prasarana relatif tersedia untuk pelaksanaan tugas
- c. Dukungan regulasi dalam menjalankan fungsi Sekretariat Daerah

b. Analisis Kelemahan (Weakness)

Kelemahan adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif, yang menghambat organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi.

Kelemahan yang ada mempengaruhi Sekretariat Daerah antara lain

- a. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja
- b. Masih ada bagian yang bekerja tidak sesuai tupoksi
- c. Alokasi anggaran belum proporsional

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (Critical Success Factors) bagi suatu organisasi dengan mengetahui kondisi eksternal organisasi akan dapat diketahui peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi

Analisis Peluang (Opportunities)

Peluang adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi. Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan adalah sebagai berikut :

1. Program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secara nasional di seluruh lembaga dan kementerian termasuk pada pemerintah daerah;
2. Berkembangnya teknologi informasi mempermudah dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;
3. Best practice beberapa daerah yang sukses dalam penyelenggaraan pemerintahan
4. Adanya animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan

Analisa Tantangan (Threat)

Ancaman adalah faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif, yang dapat mengakibatkan organisasi gagal dalam mencapai visi dan misi. Ancaman yang harus dijawab adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik
2. Keterbatasan pembiayaan dalam penyelenggaraan daerah
3. Kompleksnya permasalahan kota
4. Keterbatasan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan

Tabel 2.4.1
ANALISA SWOT

STRENGTH - WEAKNESS

NO	KEKUATAN (STRENGTH)	NO	KELEMAHAN (WEAKNESS)
1	Merupakan SKPD yang mempunyai fungsi Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS)	1	Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja .
2	Sarana dan Prasarana relatif tersedia untuk pelaksanaan tugas	2	Masih ada bagian yang bekerja tidak sesuai tupoksi
3	Dukungan regulasi dalam menjalankan fungsi Sekretariat Daerah	3.	Alokasi anggaran belum proporsional

OPPORTUNITIES – THREAT

NO	PELUANG (Opportunities)	NO	TANTANGAN (Threat)
1	Program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secara nasional di seluruh lembaga dan kementerian termasuk pada pemerintah daerah	1	Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik
2	Berkembangnya teknologi informasi mempermudah dalam melakukan pekerjaan sehari-hari	2	Keterbatasan pembiayaan dalam penyelenggaraan daerah
3	Best practice beberapa daerah yang sukses dalam penyelenggaraan pemerintahan	3	Kompleksnya permasalahan kota
4	Adanya Animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan	4	Keterbatasan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Berdasarkan data dan informasi diatas di dapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi SW
 - a. Memenuhi jumlah dan meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan melalui fungsi koordinasi
 - b. Meningkatkan pemahaman aparatur tentang tupoksi melalui pendekatan sosialisasi internal
 - c. Pemenuhan anggaran karena kebijakan pemerintah pusat melalui fungsi koordinasi
2. Strategi OT
 - a. Mendorong pelaksanaan program nasional Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah kota bukittinggi
 - b. Meningkatkan inovasi dan kreativitas seluruh aparatur dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan
 - c. Melakukan kerjasama dengan daerah lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan
 - d. Mendorong pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pembangunan
 - e. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dunia usaha
3. Strategi ST
 - a. Mendorong unit penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui fungsi koordinasi
 - b. Mengoptimalkan dukungan regulasi untuk menyelesaikan permasalahan kota
4. Strategi OW
 - a. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menyikapi kekurangan jumlah aparatur

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II dan III serta Rincian Tugas Eselon IV di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* dapat diwujudkan. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang dihadapi Kota Bukittinggi pada tahun 2016-2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Masih minimnya MoU kerjasama dan perjanjian kinerja antar daerah Kota Bukittinggi dengan daerah lain
- 2) Masih banyak produk hukum daerah yang sudah tidak relevan dengan ketentuan permendagri dan kondisi riil daerah
- 3) Kualitas evaluasi terhadap penyelenggaraan otonomi daerah masih belum optimal
- 4) Realisasi belanja modal pembangunan masih belum maksimal

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan telah dilantikannya Walikota Bukittinggi dan Wakil Walikota Bukittinggi periode 2016-2021, pada tanggal 17 Februari 2016, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-616 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Tentang Pengangkatan Walikota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat maka Visi Misi Kepala Daerah terpilih tersebut selanjutnya dijabarkan dalam dokumen perencanaan lima tahun daerah dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi tahun 2006-2025.

Visi Kota Bukittinggi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021.

**“TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA,
PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA,
BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”**

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bukittinggi kota tujuan pariwisata mempunyai makna bahwa Bukittinggi merupakan salah satu sentral wisata di wilayah Indonesia bagian barat yang disemangati dengan budaya yang bermartabat, masyarakat yang religius, kegiatan perdagangan yang maju, alam yang indah, kuliner yang berkelas, tertata, bersih dan sehat.
2. Bukittinggi kota pendidikan mengandung makna bahwa Bukittinggi mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai daya saing yang tinggi.
3. Bukittinggi kota kesehatan mengandung makna bahwa masyarakat kota Bukittinggi mempunyai derajat kesehatan yang tinggi dan sentra pelayanan kesehatan daerah sekitarnya
4. Bukittinggi kota perdagangan dan jasa mengandung makna bahwa semua pelaku ekonomi mempunyai jiwa kewirausahaan yang berdaya saing tinggi.

5. Bukittinggi sebagai kota yang berlandaskan nilai-nilai agama mengandung makna bahwa masyarakat Bukittinggi menjadikan agama sebagai landasan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan berusaha.
6. Bukittinggi sebagai kota yang beradat dan berbudaya mengandung makna dalam menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Secara umum untuk mencapai Visi dimaksud ditetapkan beberapa langkah dan strategi yaitu :

- a. Menjadikan nilai-nilai agama dan budaya yang telah hidup dan berkembang selama ini sebagai modal dasar guna mendorong peningkatan kegiatan pembangunan dengan segala aspeknya.
- b. Mengembangkan pola partisipatif dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
- c. Menumbuhkan kembangkan kesadaran dan kepedulian para pelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya termasuk perantau) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi serta memelihara pembangunan Kota Bukittinggi pada masa-masa selanjutnya.
- d. Memperkuat dan memberdayakan masing-masing sektor pendukung dan sumber daya pembangunan sehingga lebih bisa menyatu dalam satu tujuan pembangunan Kota Bukittinggi ke depan.
- e. Membangun sinergitas kuat antar sektor, pelaku pembangunan.
- f. Membangun karakter sumber daya manusia aparat pengelola pembangunan yang lebih terintegrasi kedalam sistem birokrasi yang tertata rapi sesuai dengan azas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment).
- g. Membangun regulasi dan sistem informasi pendukung pelaksanaan dan penataan pembangunan Kota Bukittinggi.
- h. Membangun kemitraan antar pelaku pembangunan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam berbagai aspek pembangunan.

Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 ditetapkan sejalan dengan RPJPD Kota Bukittinggi. Ada 5 Misi yang telah ditetapkan sebagai perwujudan dan penjabaran dari Visi. Adapun Misi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).
2. Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara professional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan system ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat.

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kota Bukittinggi terkait dengan tugas dan fungsi masing masing bagian Sekretariat daerah sebagai berikut :

No.	Misi	No.	Tujuan	No.	Sasasarn
1.	Misi 1 : Mengembangkan dan memberdayakan persisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat)	1.	Terwujudnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pembiayaan pemabngunan	1.	Meningkatnya komitmen pembiayaan pembangunan dari dunia usaha
2.	Misi 2 : Meningkatkan kinerja pemerintah secara professional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan	2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Kota Bukittinggi	2.	Mewujudkan penyelenggaraan pemeintahan yang tertib
				3.	Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan

No.	Misi	No.	Tujuan	No.	Sasasarn
				4	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat
				5	Mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif
				6	Meningkatnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah
				7	Meningkatnya kualitas informasi penyelenggaraan pemerintah
3.	Misi 4 : Mengembnagkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna	3	Terkendalnya inflasi	8	Meningkatnya pengendalian komoditas pendorong inflasi daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yannunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut yang terkait dengan fungsi Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Minimal

Setiap tahunnya pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan SPM ke Kementerian Dalam Negeri. Perubahan paradigma penting mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja daerah. Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja pemerintah daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

2. Pengelolaan Pengaduan (SP4N)

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, kepada Pemerintah Daerah yang pengelolaan pengaduannya belum terintegrasi dalam aplikasi LAPOR!-SP4N

3. Survei Kepuasan Masyarakat

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, PermenPANRB telah mengeluarkan Peraturan MENPANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

4. Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2001

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan struktur dan pola ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi yang di tuangkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030. Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bukittinggi adalah mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai tempat pemukiman, pariwisata budaya dan pariwisata alam, pusat perdagangan dan jasa yang aman dan nyaman berbasis mitigasi bencana serta memperhatikan keterlanjutan pemanfaatan sumber daya alam.

Kebijakan penataan wilayah Kota Bukittinggi meliputi :

- a. Pembangunan Kota Bukittinggi berbasis kebencanaan
- b. Pembangunan pusat-pusat pelayanan Kota Bukittinggi secara merata di dasarkan pada kesesuaian fungsi pusat-pusat pelayanan, sebaran permukiman dan dukungan system transportasi.
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta sarana dan prasarana Kota Bukittinggi yang merata dan terpadu secara regional dan nasional.
- d. Peningkatan keterpaduan antarkegiatan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- e. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pembangunan Kota Bukittinggi melalui kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan peran masyarakat.
- f. Pengembangan sector pariwisata alam dan pariwisata budaya Kota Bukittinggi agar memiliki peran yang strategis ditingkat regional, nasional dan internasional.
- g. Peningkatan fungsi dan kualitas perlindungan setempat dan cagar budaya di kota Bukittinggi.
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara serta turut memelihara dan menjaga asset pertanahan/TNI.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap tugas pokok dan fungsi, visi misi kepala daerah dan telaahan terhadap Renstra kementerian lembaga dan pemerintah provinsi maka ditetapkan isu strategis sekretariat daerah sebagai berikut :

1. Partisipasi pihak swasta dan pendonor terhadap pembangunan Kota Bukittinggi berupa pembiayaan pembangunan masih rendah;

2. Masih minimnya MoU kerjasama dan perjanjian kerjasama antar daerah Kota Bukittinggi dengan daerah lain dan yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja sama;
3. Masih banyaknya produk hukum daerah yang sudah tidak relevan dengan ketentuan perundangan-undangan dan kondisi riil daerah;
4. Kualitas evaluasi terhadap penyelenggaraan otonomi daerah masih belum optimal;
5. Kota Bukittinggi termasuk daerah Sumbar bagian utara yang menjadi pusta pertumbuhan ekonomi dan menjadi barometer serta barometer inflasi;
6. Realisasi belanja modal pembangunan masih belum maksimal;
7. Bukittinggi menjadikan nilai-nilai adat dan agama sebagai landasan pembangunan namun masih terdapat rumah ibadah dan lembaga pendidikan yang belum berjalan dengan baik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasasan Jangka Menengah SKPD

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
						1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pembiayaan pembangunan	1.	Meningkatnya komitmen pembiayaan pembangunan dari dunia usaha	1.	Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (CSR) terhadap belanja langsung APBD	1	1,5	1,75	2	2,25
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kota Bukittinggi	2.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib	2.	Peringkat EKPPD dan LPPD	65	55	40	35	35
				3.	Jumlah Mou	0	2	3	4	5
		3	Meningkatnya tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan	4	Persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan per UU	Na	100	100	100	100
				5	Persentase sarana ibadah yang aktif	100	100	100	100	100
		4.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat	6	Persentase lembaga agama yang aktif	100	100	100	100	100
				7	Nilai Evaluasi SAKIP Kota	C	B	BB	BB	A
		5.	Meujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif	8	Indek Kematangan Organisasi	30	70	75	75	50
				9	Persentase pengadaan barang dan jasa kontrak	85	100	100	100	100
		7	Meningkatnya kualitas informasi penyelenggaraan pemerintah	10	Persentase informasi yang direspon	Na	35	40	45	50
				11	Persentase pewarta yang aktif memberikan informasi	Na	Na	100	100	100
3	Terkendalnya inflasi	8	Meningkatnya pengendalian komoditas pendorong inflasi daerah	12	Jumlah komoditas yang dikendalikan	100	100	100	100	100

4.2. Indikator Kinerja Utama

Setelah dilakukan penyesuaian terhadap pencapaian visi dan misi Daerah Kota Bukittinggi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021, maka ari beberapa tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah seperti Tabel berikut:

Tabel 4.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2016-2021

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	KONDISI AKHIR
1	Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (CSR) terhadap belanja langsung APBD	Jumlah anggaran CSR/ jumlah belanja langsung APBD	1	1.5	1.75	2	2.25	2.5	2.5
2	Peringkat EKPP dan LPPD	Skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	65	55	40	35	35	30	30
3	Jumlah MoU	Jumlah Mou yang sudah dibuat pada tahun berjalan	0	2	3	4	5	6	6
4	Persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah produk hukum yang sudah sesuai ketentuan perundang-undangan/ Jumlah seluruh produk hukum yang disusun pada tahun berjalan	Na	100	100	100	100	100	100
5	Persentase sarana ibadah aktif	Jumlah sarana yang aktif / jumlah sarana yang ada	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase lembaga agama yang aktif	Jumlah lembaga agama yang aktif / jumlah lembaga agama yang ada	100	100	100	100	100	100	100
7	Nilai evaluasi SAKIP Kota	Nilai evaluasi SAKIP Kota Bukittinggi yang diterbitkan oleh KemenPAN RB	C	B	BB	BB	A	A	A

8	Indeks Kematangan Organisasi	Hasil indeks Kematangan organisasi pada seluruh SKPD penyelenggaraan pelayanan publik	30	70	75	75	50	45	
9	Persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak	Jumlah pengadaan barang dan jasa terkontrak terlaksana 100% / jumlah pengadaan barang dan jasa terkontrak	85	100	100	100	100	100	100
10	Persentase informasi yang direspon	Jumlah informasi yang direspon/informasi yang dipublish	NA	35	40	45	50	55	60
11	Persentase pewarta yang aktif memberikan informasi	Jumlah pewarta aktif/jumlah seluruh pewarta	NA	NA	100	100	100	100	100
12	Jumlah komoditas yang dikendalikan	Jumlah komoditas yang dikendalikan dikota Bukittinggi/Jumlah yang dikendalikan propinsi Sumbar	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Sekretariat Daerah adalah strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat Daerah menunjukkan bagaimana cara Sekretariat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Sekretariat daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Sekretariat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Sekretariat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Sekretariat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Bukittinggi sebagai mana tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Misi 1 : Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat)			
1. Terwujudnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pembiayaan pembangunan	Meningkatnya komitmen pembiayaan pembangunan dari dunia usaha	Mendorong pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	1. Memfasilitasi forum pengembangan ekonomi daerah
Misi 2 : Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan			
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Kota Bukittinggi	1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib 2. Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan 3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat 4. Mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif 5. Meningkatkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah	Melakukan kerjasama dengan daerah lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Mengoptimalkan pelaksanaan produk hukum daerah Melakukan kegiatan bidang keagamaan Membuat aturan tentang susunan organisasi Melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai aturan	Memfasilitasi dan Monitoring Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah Penataan dan pengembangan dokumentasi hukum Meningkatkan fasilitasi dan dukungan bagi lembaga /organisasi keagamaan untuk meningkatkan pelaksanaan nilai – nilai agama serta kesejahteraan masyarakat Melakukan penyusunan Anjab ABK Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa
	6. Meningkatkan kualitas informasi penyelenggaraan pemerintah	Melakukan pengkajian atas informasi yang ada	Mempublikasikan kebijakan pemerintah daerah melalui sosialisasi dan media elektronik
Misi 4 : Meningkatkan pembangunan ekonomi perkotaan yang berkualitas			
3. Terkendalinya Inflasi	Menuingkatkan pengendalian komoditas pendorong inflasi daerah	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dunia usaha	Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Ekonomi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan yang pro rakyat yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJM Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, masingmasing Bagian di Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengantugas dan fungsi SKPD dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengahKPD. Dan untuk melihat uraian target indikator kinerja program dan kegiatan dapat dilihat dalam matrik program dan kegiatan rencana strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (tabel 6.1) sebagaimana terlampir:

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021

TUJUAN TINGKAT SKPD	SASARAN TINGKAT SKPD	INDIKATOR TINGKAT SKPD	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	LOKASI
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
						TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA		
Terwujudnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pembiayaan pembangunan dari dunia usaha	Meningkatnya komitmen pembiayaan pembangunan dari dunia usaha	Rasio pembiayaan yang bersumber dari masyarakat (CSR) terhadap belanja langsung APBD	Pengembangan Potensi Ekonomi	Meningkatnya tingkat perekonomian	1%	2%	150.000.000	3%	150.000.000	3%	150.000.000	3%	150.000.000	3%	160.000.000	4%	160.000.000	Bagian perekonomian	Sekretariat daerah
			Fasilitasi tim koordinasi tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP)	% Dunia Usaha yang Berpotensi Membiayai Program Pembangunan	0	1	150.000.000	1	150.000.000	2	150.000.000	4	150.000.000	4	160.000.000	4	160.000.000	Bagian perekonomian	Sekretariat daerah
			Pendataan Potensi																
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Kota Bukittinggi	Mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif	Indek kematangan organisasi	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Pemenuhan struktur organisasi pemerintah daerah	100%	100%	94.760.000	100%	119.457.500	100%	53.245.100	100%	0	100%	0	100%	0	Bagian Organisasi	Kota Bukittinggi
			Penyusunan struktur organisasi Perangkat daerah	% Urusan didukung oleh Data yang Valid	95%	100%	94.760.000	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Bagian Organisasi	Kota Bukittinggi
			Sosialisasi Peningkatan pemahaman Tusi Perangkat Daerah	% Tusi yang tidak Sesuai	95%	100%	0	100%	46.364.500	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Bagian Organisasi	Kota Bukittinggi
			Pembentukan UPTD/UPTB SKPD sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014	% Urusan didukung oleh Data yang Valid	90%	95%	0	100%	73.093.000	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Bagian Organisasi	Kota Bukittinggi
			Evaluasi kelembagaan dan Tusi organisasi perangkat daerah	% Tusi yang tidak Sesuai	95%	95%	0	95%	0	100%	28.422.000	100%	0	100%	0	100%	0	Bagian Organisasi	Kota Bukittinggi
			Penyusunan revisi Tupoksi sesuai hasil evaluasi	% Tusi yang tidak Sesuai	90%	95%	0	95%	0	100%	24.823.100	100%	0	100%	0	100%	0	Bagian Organisasi	Kota Bukittinggi

TUJUAN TINGKAT SKPD	SASARAN TINGKAT SKPD	INDIKATOR TINGKAT SKPD	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	LOKASI
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
						TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA		
			Program Peningkatan Pelayanan Publik	persentase peningkatan pelayanan publik	50%	60%	70.874.500	70%	148.392.000	80%	122.622.000	100%	144.554.000	100%	238.503.000	100%	285.000.000	Bagian Organisasi	Kota Bukittinggi
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur	% SKPD Menyusun SOP sesuai Ketentuan	60%	60%	0	60%	0	60%	0	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	Bagian Organisasi	Kota Bukittinggi
			Pelaporan pencapaian Standar Pelayanan Minimal	% capaian SPM SKPD sesuai target	75%	75%	0	80%	30.000.000	90%	30.055.000	100%	35.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	Bagian Organisasi	Kota Bukittinggi
			Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	% SKPD memiliki Inovasi Layanan Publik	0%	10%	70.874.500	15%	58.392.000	20%	28.503.000	30%	14.554.000	40%	43.503.000	50%	70.000.000	Bagian Organisasi	Kota Bukittinggi
			Survey kepuasan masyarakat	% SKPD Layanan Publik melakukan survey IKM	50%	50%	0	60%	25.000.000	65%	26.064.000	75%	15.000.000	85%	50.000.000	95%	55.000.000	Bagian Organisasi	Kota Bukittinggi
			Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi	% SKPD Memiliki Program Pendukung Penerapan 8 Area perubahan	50%	50%	0	50%	0	50%	0	60%	40.000.000	70%	45.000.000	80%	50.000.000	Bagian Organisasi	Kota Bukittinggi
			Penyelenggaraan Pengaduan melalui aplikasi SP4N	% pengaduan yang ditindaklanjuti	0%	0%	0	90%	35.000.000	100%	38.000.000	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	Bagian Organisasi	Kota Bukittinggi
			Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Pemenuhan struktur organisasi pemerintah daerah	90%	90%	0	100%	155.966.500	100%	76.124.000	100%	0	100%	0	100%	0	Bagian Organisasi	Kota Bukittinggi
			Penyusunan Anjab dan ABK	% SKPD Memiliki Informasi Jabatan sesuai Aturan	90%	90%	0	100%	98.199.500	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Bagian Organisasi	Kota Bukittinggi
			Pembuatan Aplikasi Anjab abk	% SKPD Memiliki Informasi Jabatan sesuai Aturan	0%	0%	0	0%	0	0%	0	100%	99.815.000	100%	0	100%	0	Bagian Organisasi	Kota Bukittinggi
			Evaluasi Standar Kompetensi Manajerial (SKM)	% Jabatan Memiliki Standar Kompetensi yang Implementatif	90%	90%	0	90%	0	100%	26.174.000	100%	0	100%	0	100%	0	Bagian Organisasi	Kota Bukittinggi

TUJUAN TINGKAT SKPD	SASARAN TINGKAT SKPD	INDIKATOR TINGKAT SKPD	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	LOKASI
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
						TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA		
			Evaluasi Standar Kompetensi Teknis	% Jabatan Memiliki Standar Kompetensi yang Implementatif	90%	90%	0	90%	0	100%	16.341.500	100%	0	100%	0	100%	0	Bagian Organisasi	Kota Bukittinggi
			Penyusunan Evaluasi Jabatan	% ASN Memiliki Penilaian Kinerja dengan Sistem Merit	90%	90%	0	100%	57.767.000	100%	49.950.000	100%	0	100%	0	100%	0	Bagian Organisasi	Kota Bukittinggi
		Nilai Evaluasi SAKIP Kota	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	90%	95%	43.629.820	100%	44.409.000	100%	31.099.010	100%	24.765.300	100%	38.159.720	100%	40.000.000	Bagian Keuangan	Kota Bukittinggi
			Penyusunan LKIP Kota Bukittinggi serta Capaian Kinerja Keuangan	% SKPD Menyusun LKIP sesuai Aturan	90%	95%	55.452.800	100%	74.132.700	100%	35.692.500	100%	30.000.000	100%	70.000.000	100%	80.000.000	Bagian Organisasi	Kota Bukittinggi
			Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah Renstra setdako	90%	95%	8.500.000	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Bagian Organisasi	Kota Bukittinggi
	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib	Peringkat EKPPD dan LPPD	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Meningkatnya kualitas kelembagaan	80%	90%	413.154.300	90%	358.639.600	95%	515.442.800	100%	492.413.500	100%	562.500.000	100%	569.500.000	Bagian Pemerintahan Umum	Kota Bukittinggi
			Penyusunan LPPD	% Pemenuhan data LPPD	80%	80%	150.278.000	90%	150.000.000	95%	155.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	Bagian Pemerintahan Umum	Kota Bukittinggi
			Penunjang Penyusunan LKPJ	% Rekomendasi DPRD ditindaklanjuti	80%	80%	149.472.000	90%	150.000.000	95%	155.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	Bagian Pemerintahan Umum	Kota Bukittinggi
			Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKKPD)	Peringkat daerah di tingkat Provinsi	5	5	30.320.000	4	26.407.500	3	12.091.500	2	15.413.500	1	21.500.000	1	22.500.000	Bagian Pemerintahan Umum	Kota Bukittinggi
			Sosialisasi Penyusunan LKPJ dan LPPD	% LPPD dan LKPJ SKPD benar	80%	80%	35.000.000	90%	—	95%	50.000.000	95%	—	100%	60.000.000	100%	60.000.000	Bagian Pemerintahan Umum	Kota Bukittinggi
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PATEN di Kecamatan	Nilai IKM PATEN Kecamatan bernilai baik	0%	50%	48.084.300	75%	32.232.100	90%	8.421.800	100%	13.000.000	100%	16.000.000	100%	17.000.000	Bagian Pemerintahan Umum	Kota Bukittinggi

TUJUAN TINGKAT SKPD	SASARAN TINGKAT SKPD	INDIKATOR TINGKAT SKPD	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	LOKASI
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
						TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA		
			Rapat koordinasi pemerintah kota/kecamatan	% permasalahan yang diselesaikan SKPD	80%	80%	0	85%	0	90%	134.929.500	95%	144.000.000	100%	145.000.000	100%	150.000.000	Bagian Pemerintahan Umum	Kota Bukittinggi
			Program Peningkatan kinerja aparatur kecamatan	Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur	60%	60%	73.000.000	75%	763.642.400	80%	376.678.065	95%	815.000.000	100%	581.000.000	100%	865.000.000	Bagian Pemerintahan Umum	Kota Bukittinggi
			Penunjang Operasional DPD LPM	jumlah rapat yg di fasilitasi	60%	60%	0	75%	17.000.000	80%	7.343.430	95%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	Bagian Pemerintahan Umum	Kota Bukittinggi
			Penilaian kelurahan berprestasi	Kelurahan berkualifikasi baik	70%	70%	0	75%	144.101.350	80%	124.265.775	95%	127.000.000	100%	130.000.000	100%	135.000.000	Bagian Pemerintahan Umum	Kota Bukittinggi
			Penilaian kompetensi lurah	Lurah berkinerja baik	80%	80%	0	85%	71.811.100	90%	51.409.930	95%	54.000.000	100%	58.000.000	100%	60.000.000	Bagian Pemerintahan Umum	Kota Bukittinggi
			Penilaian kompetensi camat Tingkat Kota Bukittinggi	Camat berkinerja baik	75%	80%	73.000.000	85%	74.495.900	90%	51.409.930	95%	54.000.000	100%	58.000.000	100%	60.000.000	Bagian Pemerintahan Umum	Kota Bukittinggi
			Peningkatan kompetensi aparatur bidang administrasi pemerintahan	Persentase aparatur bidang administrasi pemerintahan berkinerja baik	75%	75%	0	80%	400.000.000	85%	123.851.000	90%	400.000.000	95%	140.000.000	100%	400.000.000	Bagian Pemerintahan Umum	Kota Bukittinggi
			Pendayagunaan profil kelurahan	Persentase kelurahan memenuhi data profil kelurahan	50%	50%	0	60%	56.234.050	65%	18.398.000	70%	150.000.000	75%	160.000.000	80%	170.000.000	Bagian Pemerintahan Umum	Kota Bukittinggi
			Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	Terwujudnya kerjasama antar daerah	30%	35%	176.162.500	40%	152.765.000	45%	117.385.000	50%	183.000.000	55%	191.000.000	60%	200.000.000	Bagian Pemerintahan Umum	Kota Bukittinggi
			Fasilitasi dan Monitoring Pembentukan Perkuatan Kerjasama antar daerah	Persentase perjanjian kerjasama yang di laksanakan	40%	50%	77.883.500	55%	54.935.000	60%	37.558.000	65%	91.000.000	75%	95.000.000	80%	100.000.000	Bagian Pemerintahan Umum	Kota Bukittinggi

TUJUAN TINGKAT SKPD	SASARAN TINGKAT SKPD	INDIKATOR TINGKAT SKPD	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	LOKASI
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
						TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA		
			Partisipasi Pemerintah Kota dalam rakernas apeksi dan rapat kerja pemerintah propinsi dengan Kab/Kota se-Sumbar	% hasil raker dan rakor yang ditindaklanjuti	75%	80%	98.279.000	85%	97.830.000	90%	79.827.000	100%	92.000.000	100%	96.000.000	100%	100.000.000	Bagian Pemerintahan Umum	Kota Bukittinggi
	Meningkatnya proses penagdaan barang dana jasa pemerintah	Persenatse pengadaan barang dan jasa terkontrak	Program Pengelolaan administrasi pembangunan	Terwujudnya administrasi pembangunan yang handal	90%	95%	509.088.000	100%	608.429.350	100%	684.647.505	100%	909.930.020	100%	1.012.750.000	100%	1.055.000.000	Bagian Pembangunan	Kota Bukittinggi
			Monitoring evaluasi dan pengendalian belanja modal	% Pengadaan barang dilaksanakan sesuai kontrak	90%	95%	40.198.000	100%	55.078.750	100%	18.172.845	100%	88.061.360	100%	150.000.000	100%	160.000.000	Bagian Pembangunan	Kota Bukittinggi
			Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisais Anggaran (TEPRA) Kegiatan APBD Kota Bukittinggi	% Capaian TEPRA Kota	90%	95%	0	100%	66.717.000	100%	62.142.860	100%	121.776.860	100%	125.000.000	100%	130.000.000	Bagian Pembangunan	Kota Bukittinggi
			Pelaksanaan proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	% kegiatan pengadaan barang dan jasa ditenderkan tepat waktu	90%	95%	468.890.000	100%	486.633.600	100%	577.132.700	100%	649.739.700	100%	672.750.000	100%	700.000.000	Bagian Pembangunan	Kota Bukittinggi
			Asistensi Penyusunan RUP Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	% SKPD mengentri RUP sesuai jadwal	90%	95%	0	100%	0	100%	27.199.100	100%	50.352.100	100%	65.000.000	100%	65.000.000	Bagian Pembangunan	Kota Bukittinggi
	Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan	Persenatse produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan per UU	Program penataan peraturan perundang-undangan	Persentase penetapan peraturan perundang - undangan	75%	80%	794.177.450	90%	777.644.150	100%	363.985.550	100%	380.244.250	100%	440.301.070	100%	456.350.000	Bagian Hukum dan HAM	Kota Bukittinggi

TUJUAN TINGKAT SKPD	SASARAN TINGKAT SKPD	INDIKATOR TINGKAT SKPD	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	LOKASI
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
						TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA		
			Perancangan dan Perumusan Produk Hukum Daerah	Persentase Rancangan Produk hukum yang ditetapkan	90%	95%	669.284.000	100%	523.954.000	100%	200.295.350	100%	200.295.350	100%	242.357.280	100%	250.000.000	Bagian Hukum dan HAM	Kota Bukittinggi
			Penataan dan Pengembangan Dokumentasi Hukum	Persentase produk hukum yang terpenuhi sesuai amanat perundang-undangan	90%	95%	32.023.450	100%	40.354.750	100%	32.773.850	100%	36.051.200	100%	39.656.320	100%	42.500.000	Bagian Hukum dan HAM	Kota Bukittinggi
			Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	% produk hukum yang terpublikasi	75%	80%	34.000.000	85%	61.286.000	90%	17.292.000	95%	19.021.200	100%	20.923.320	100%	21.850.000	Bagian Hukum dan HAM	Kota Bukittinggi
			Pembuatan Buku Lembaran Daerah , Berita Daerah dan pendistribusian nya	% produk hukum daerah di upload melalui website dengan baik	50%	55%	28.153.500	60%	76.101.800	70%	60.672.800	80%	66.630.000	90%	73.293.000	100%	75.000.000	Bagian Hukum dan HAM	Kota Bukittinggi
			Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	% Peraturan pelaksanaan peraturan daerah berupa perwako dan keputusan walikota yang divalidasi	50%	50%	0	50%	0	60%	42.992.750	70%	47.292.000	80%	52.021.200	90%	55.650.000	Bagian Hukum dan HAM	Kota Bukittinggi
			Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Persentase penetapan peraturan perundang - undangan sesuai ketentuan	90%	95%	30.716.500	100%	75.947.600	100%	52.951.550	100%	58.246.500	100%	64.071.150	100%	67.000.000	Bagian Hukum dan HAM	Kota Bukittinggi
			Advokasi Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan Daerah	% Masalah Pembangunan yang Diadvokasi	90%	95%	10.867.300	100%	212.775.000	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Bagian Hukum dan HAM	Kota Bukittinggi
			Pembinaan Kelurahan dan Keluarga Sadar Hukum	% terbentuknya kelurahan dan keluarga sadar hukum	60%	60%	0	65%	53.669.500	70%	37.616.550	75%	41.378.205	80%	45.516.026	85%	49.500.000	Bagian Hukum dan HAM	Kota Bukittinggi

TUJUAN TINGKAT SKPD	SASARAN TINGKAT SKPD	INDIKATOR TINGKAT SKPD	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	LOKASI
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
						TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA		
			Penelitian dan Evaluasi Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga / Masyarakat	Persentase perjanjian yang diteliti	80%	85%	12.168.200	90%	23.008.250	95%	15.776.300	100%	17.353.900	100%	19.089.290	100%	21.850.000	Bagian Hukum dan HAM	Kota Bukittinggi
			Program penataan peraturan perundang- undangan	Persentase penetapan peraturan perundang - undangan	75%	80%	201.985.500	90%	498.088.250	100%	147.133.460	100%	161.846.705	100%	178.031.376	100%	194.250.000	Bagian Hukum dan HAM	Kota Bukittinggi
			Penanganan Perkara - perkara Pemda	% perkara yang tertangani dengan baik	80%	85%	163.502.500	90%	170.139.400	100%	38.085.000	100%	41.893.500	100%	46.082.850	100%	50.000.000	Bagian Hukum dan HAM	Kota Bukittinggi
			Sosialisasi Rencana aksi Nasional Hak Azazi Manusia	% Pejabat yang telah mengikuti sosialisasi	75%	80%	15.447.500	85%	38.496.100	90%	12.662.860	95%	13.929.100	100%	15.322.010	100%	17.250.000	Bagian Hukum dan HAM	Kota Bukittinggi
	Meningkatn ya kualitas informasi penyelengg araan pemerintah	Persentasi Informasi yang Direspon	Program Peningkatan Peran Kehumasan	persentase peningkatan pelayanan publik	60%	65%	2.498.307.8 00	70%	2.402.871.000	75%	2.147.478.7 95	80%	2.324.224.12 0	85%	3.047.571.2 35	90%	3.125.000.00 0	Bagian Hubungan Masyarakat	Kota Bukittinggi
			Dialog Interaktif Selamat pagi Walikota	% dialog interaktif direspon masyarakat	90%	95%	35.706.000	100%	45.723.600	100%	31.915.200	100%	32.000.000	100%	66.516.407	100%	70.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Kota Bukittinggi
			Penyebarluasa n Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat melalui Media Elektronik dan Mobil Unit	% Cakupan penyebarluasa n informasi	90%	95%	253.000.000	100%	258.410.000	100%	250.405.610	100%	260.000.000	100%	340.000.000	100%	350.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Kota Bukittinggi
			Kegiatan Pers Release	% kegiatan daerah dimuat dalam media berita daerah dan provinsi	90%	95%	31.368.800	100%	51.005.000	100%	23.231.920	100%	60.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Kota Bukittinggi
			Kegiatan Pers Release	% kegiatan daerah dimuat dalam media berita daerah dan provinsi	90%	95%	31.368.800	100%	51.005.000	100%	23.231.920	100%	60.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Kota Bukittinggi

TUJUAN TINGKAT SKPD	SASARAN TINGKAT SKPD	INDIKATOR TINGKAT SKPD	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	LOKASI
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
						TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA		
			Pembuatan Majalah, Tabloid internal Pemko Bukittinggi	% kegiatan pemko yang dirilis setiap bulannya	90%	95%	238.800.000	100%	184.608.100	100%	138.226.600	100%	240.000.000	100%	175.000.000	100%	200.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Kota Bukittinggi
			Pemasangan Spanduk, Brosur, Leaflet dan Pamflet	Jumlah spanduk, brosur, leaflet dan pamflet	90%	95%	200.000.000	100%	181.500.000	100%	181.500.000	100%	210.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Kota Bukittinggi
			Bimbingan Teknis Kehumasan	% Pengelola Informasi yang bersertifikat	50%	50%	0	50%	0	50%	0	80%	60.000.000	90%	75.000.000	100%	75.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Kota Bukittinggi
			Pengumpulan Data Informasi, Kliping dan Penelaah Berita	% kegiatan pemko yang dirilis setiap bulannya	90%	95%	41.613.800	100%	19.196.050	100%	9.482.770	100%	9.500.000	100%	9.900.000	100%	10.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Kota Bukittinggi
			Bimbingan Teknis Jurnalistik bagi Pewarta	% Pewarta bersertifikat UKW	50%	50%	0	50%	0	50%	0	80%	60.000.000	90%	75.000.000	100%	75.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Kota Bukittinggi
			Penunjang Pers dan Kehumasan	% media provinsi yang mempublikasikan kegiatan pemko secara proporsional	90%	95%	232.696.000	100%	219.891.850	100%	106.845.000	100%	106.845.000	100%	319.887.669	100%	320.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Kota Bukittinggi
			Promosi Melalui Mass Media, Profil dan Dokumentasi	Persentase kegiatan startegis kota dimuat dalam profil daerah	90%	95%	636.529.200	100%	627.092.400	100%	595.779.120	100%	595.779.120	100%	625.000.000	100%	650.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Kota Bukittinggi
			Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Cetak	Persentase kegiatan strategis kota dirilis melalui pariwara	90%	95%	828.594.000	100%	815.444.000	100%	810.092.575	100%	810.100.000	100%	1.186.267.159	100%	1.200.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Kota Bukittinggi
Terkendalinya inflasi	Meningkatnya pengendalian komoditas pendorong inflasi daerah	Jumlah komoditas yang dikendalikan	Program Pengembangan Potensi Ekonomi	% Rekomendasi Pengembangan Ekonomi ditindaklanjuti	90%	95%	74.150.000	100%	121.346.500	100%	184.664.895	100%	867.445.525	100%	321.800.000	100%	340.000.000	Bagian Perekonomian	Kota Bukittinggi
Koordinasi intervensi pasar	% Produk yang stabil melalui intervensi		60%	60%	0	60%	0	70%	54.080.620	80%	55.000.000	85%	60.000.000	90%	70.000.000	Bagian Perekonomian	Kota Bukittinggi		

TUJUAN TINGKAT SKPD	SASARAN TINGKAT SKPD	INDIKATOR TINGKAT SKPD	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	LOKASI
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
						TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA		
			Penunjang operasional kegiatan tim forum pengembangan ekonomi daerah	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti	50%	55%	32.000.000	60%	53.005.000	65%	36.108.875	70%	46.960.525	75%	58.800.000	80%	60.000.000	Bagian Perekonomian	Kota Bukittinggi
			Koordinasi dan sosialisasi bidang ekonomi	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti	50%	50%	0	60%	32.326.500	65%	55.831.400	70%	715.935.000	75%	153.000.000	80%	155.000.000	Bagian Perekonomian	Kota Bukittinggi
			Monitoring, evaluasi dan pembinaan BUMD	Nilai Kinerja BUMD	75%	78%	42.150.000	80%	36.015.000	85%	38.644.000	88%	49.550.000	90%	50.000.000	93%	55.000.000	Bagian Perekonomian	Kota Bukittinggi
			Program Pengelolaan Stabilitas perekonomian	Tingkat inflasi daerah	3%	3%	52.850.000	3,5%	118.979.000	3,5%	86.431.610	3,5%	141.523.800	3,5%	291.000.000	3%	300.000.000	Bagian Perekonomian	Kota Bukittinggi
			Penunjang Operasional Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bukittinggi	% Harga Indikator Inflasi terkendali	90%	95%	52.850.000	100%	72.235.000	100%	59.025.000	100%	76.700.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	Bagian Perekonomian	Kota Bukittinggi
			Koordinasi dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	% LKM aktif	90%	95%	0	100%	46.744.000	100%	22.707.410	100%	41.338.800	100%	60.000.000	100%	65.000.000	Bagian Perekonomian	Kota Bukittinggi
			Monitoring dan evaluasi pengawasan dan pembinaan energi dan sumber daya mineral	% Agen dan Penyalur Gas sesuai Harga yang ditentukan	90%	95%	0	100%	0	100%	4.699.200	100%	23.485.000	100%	71.000.000	100%	75.000.000	Bagian Perekonomian	Kota Bukittinggi
	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat	Persentase sarana ibadah yang aktif	Program Peningkatan pemahaman, pengamalan kehidupan beragama	Terjaganya kerukunan antar dan intern umat bergama	90%	95%	4.839.798.500	100%	5.218.621.900	100%	6.531.943.055	100%	9.312.724.900	100%	8.431.078.400	100%	9.910.000.000	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi
			Wirid Pengajian dan Halal Bi Halal	% PNS berkinerja baik	75%	80%	20.950.000	85%	48.679.600	85%	41.267.020	85%	49.580.000	90%	50.000.000	90%	55.000.000	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi

TUJUAN TINGKAT SKPD	SASARAN TINGKAT SKPD	INDIKATOR TINGKAT SKPD	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	LOKASI
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
						TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA		
		Persentase lembaga agama yang aktif	Pelepasan dan Penyambutan TPHD dan Jemaah Haji Kota Bukittinggi	% Jema'ah Haji terfasilitasi	100%	100%	176.100.000	100%	342.462.900	100%	313.187.900	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	400.000.000	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi
	Pembinaan administrasi manajemen mesjid		% Masjid terfasilitasi	50%	50%	0	50%	0	50%	0	60%	214.600.000	70%	234.600.000	80%	250.000.000	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	
	Pengadaan Kalender Hijriah		% lembaga menggunakan kalender hijriyah	50%	60%	22.950.000	65%	22.010.500	70%	22.735.860	75%	28.500.000	80%	29.000.000	85%	30.000.000	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	
	Tablig Akbar		% kehadiran undangan dalam peringatan hari jadi kota	60%	60%	0	75%	178.050.000	75%	164.250.000	75%	164.250.000	80%	164.250.000	80%	165.000.000	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	
	Pemberian bantuan tunjangan kesejahteraan Guru MDTA, TPQ / TKQ / TPSA, Pongpes, Garin Mesjid / Mushalla		% bantuan yang tersalurkan	60%	65%	3.215.000.000	70%	3.211.930.500	75%	3.492.150.400	75%	4.201.000.000	80%	4.201.000.000	80%	4.250.000.000	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	
	Oprasional Kunjungan Tim Ramadhan		% Masjid/ Mushalla dikunjungi	90%	95%	579.700.000	100%	582.118.000	100%	1.315.773.800	100%	1.447.351.000	100%	1.592.086.000	100%	1.650.000.000	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	
	Pelatihan Da'i dan mubaligh tingkat kota bukittinggi		% Da'i yang mengikuti pelatihan	20%	20%	0	25%	69.083.900	25%	25.115.540	35%	77.500.000	35%	85.198.500	40%	90.000.000	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	
	Pelatihan Guru MDTA, TPQ, Pondok Qur'an, pondok pesantren, TKQ		% Guru terlatih	20%	20%	0	25%	282.256.900	25%	59.643.900	35%	59.643.900	35%	59.643.900	40%	60.000.000	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	
	Pelatihan Guru Didikan Subuh		% Guru DDS terlatih	20%	20%	0	25%	178.050.000	25%	42.531.500	35%	145.000.000	35%	155.000.000	40%	160.000.000	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	
	MTQ Tingkat Kota Bukittinggi		% lomba yang diikuti	80%	85%	749.998.500	85%	0	90%	771.602.570	90%	0	95%	750.000.000	95%	0	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	
	Lomba DDS Kota Bukittinggi		% masjid/ mushalla mengikuti lomba DDS	60%	65%	62.100.000	70%	57.115.000	75%	50.992.720	80%	73.000.000	85%	78.000.000	90%	80.000.000	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi	

TUJUAN TINGKAT SKPD	SASARAN TINGKAT SKPD	INDIKATOR TINGKAT SKPD	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	LOKASI
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
						TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA		
			Pemberian Penghargaan Pemenang Juara Khatam Alqur'an	% MDTA menyelenggarakan Khatam Quran	75%	75%	0	100%	179.254.900	100%	195.649.540	100%	195.700.000	100%	195.700.000	100%	200.000.000	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi
			MTQ Tingkat Propinsi Sumatera Barat	% Lomba yang diikuti	80%	80%	0	85%	29.542.500	85%	0	90%	1.850.000.000	90%	0	95%	2.000.000.000	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kota Bukittinggi	Nilai SAKIP	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	Jumlah Renja Setdako	90%	95%	34.848.000	100%	32.173.000	100%	24.214.220	100%	18.250.000	100%	26.000.000	100%	30.000.000	Bagian Keuangan	Kota Bukittinggi
			Penyusunan Laporan keuangan semesteran	% laporan keuangan semesteran perbagian disusun tepat waktu	90%	95%	7.993.800	100%	6.018.000	100%	5.835.160	100%	2.458.700	100%	6.000.000	100%	6.500.000	Bagian Keuangan	Kota Bukittinggi
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	% laporan keuangan akhir tahunperbagian disusun tepat waktu	90%	95%	13.280.120	100%	15.023.000	100%	8.604.130	100%	5.646.880	100%	9.500.000	100%	10.000.000	Bagian Keuangan	Kota Bukittinggi
			Pengelolaan Keuangan SKPD	% laporan keuangan perbagian disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	90%	95%	22.355.900	100%	23.368.000	100%	16.659.720	100%	16.659.720	100%	22.659.720	100%	23.500.000	Bagian Keuangan	Kota Bukittinggi
			Program Peningkatan Saran dan Prasarana	terwujudnya peningkatan sarana prasarana kantor	90%	90%	6.034.000.000	100%	2.600.000.000	100%	3.750.036.500	100%	2.892.036.500	100%	5.400.000.000	100%	8.650.000.000	Bagian Umum dan Perlengkapan	Kota Bukittinggi
			Pengadaan Perlengkapan Kantor	% pemenuhan perlengkapan kantor	90%	95%	270.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	Bagian Umum dan Perlengkapan	Kota Bukittinggi
			Pengadaan Mebeleur	% pemenuhan mebeleur kanor	90%	95%	318.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	Bagian Umum dan Perlengkapan	Kota Bukittinggi
			Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	% pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/operasiona	90%	95%	2.675.000.000	100%	570.000.000	100%	1.200.000.000	100%	500.000.000	100%	1.000.000.000	100%	3.000.000.000	Bagian Umum dan Perlengkapan	Kota Bukittinggi

TUJUAN TINGKAT SKPD	SASARAN TINGKAT SKPD	INDIKATOR TINGKAT SKPD	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	LOKASI
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
						TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA		
			Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	% pemenuhan peralatan rumah jabatan/dinas	90%	95%	200.000.000	100%	150.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	Bagian Umum dan Perlengkapan	Kota Bukittinggi
			Pengadaan Peralatan Kantor	% pemenuhan peralatan kantor	90%	95%	1.215.000.000	100%	300.000.000	100%	135.036.500	100%	135.036.500	100%	600.000.000	100%	1.500.000.000	Bagian Umum dan Perlengkapan	Kota Bukittinggi
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah jabatan / Dinas	% pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rumah jabatan/dinas	90%	95%	171.000.000	100%	35.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	Bagian Umum dan Perlengkapan	Kota Bukittinggi
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	% pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	90%	95%	815.000.000	100%	920.000.000	100%	905.000.000	100%	562.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	Bagian Umum dan Perlengkapan	Kota Bukittinggi
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	% perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	90%	95%	30.000.000	100%	25.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	Bagian Umum dan Perlengkapan	Kota Bukittinggi
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	% pemenuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	90%	95%	250.000.000	100%	200.000.000	100%	0	100%	0	100%	100.000.000	100%	100.000.000	Bagian Umum dan Perlengkapan	Kota Bukittinggi
			Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	% gedung kantor yang di rehab	90%	90%	0	90%	0	100%	905.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.500.000.000	Bagian Umum dan Perlengkapan	Kota Bukittinggi
			Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Putih	pakaian dinas harian PNS	90%	95%	90.000.000	100%	0	100%	0	100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	Bagian Umum dan Perlengkapan	Kota Bukittinggi
			Program Peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan wakil KDH	Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan Wakil KDH	90%	95%	12.265.500.000	100%	7.559.900.000	100%	7.421.900.350	100%	8.115.921.210	100%	10.375.000.000	100%	11.850.000.000	Bagian Hubungan Masyarakat	Kota Bukittinggi
			Penunjang Keprotokolan dan Pantap Agenda Pimpinan	Persentase kegiatan daerah terfasilitasi sesuai standar keprotokolan	90%	95%	365.000.000	100%	320.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	Bagian Umum dan Perlengkapan	Kota Bukittinggi
Fasilitasi Acara dan Upacara Nasional dan Kedaerahan	Persentase kegiatan kedinasan KDH dan Wakil KDH terfasilitasi		90%	95%	1.105.000.000	100%	480.000.000	100%	625.000.000	100%	625.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	Bagian Umum dan Perlengkapan	Kota Bukittinggi		

TUJUAN TINGKAT SKPD	SASARAN TINGKAT SKPD	INDIKATOR TINGKAT SKPD	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	LOKASI
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
						TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA		
			Penerimaan Kunjungan Tamu Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan KDH sesuai standar protokoler	90%	95%	2.490.000.000	100%	1.435.000.000	100%	1.575.000.000	100%	1.575.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.500.000.000	Bagian Umum dan Perlengkapan	Kota Bukittinggi
			Penunjang Operasional dan Fasilitas Pelayanan Kedinasan KDH	Persentase kegiatan kedinasan KDH dan Wakil KDH terfasilitasi	90%	95%	7.850.500.000	100%	2.599.000.000	100%	2.586.166.990	100%	3.000.000.000	100%	4.000.000.000	100%	4.500.000.000	Bagian Umum dan Perlengkapan	Kota Bukittinggi
			Penunjang Operasional dan Fasilitas Pelayanan Kedinasan WKDH	Persentase kegiatan kedinasan KDH dan Wakil KDH terfasilitasi	90%	95%	0	100%	1.846.400.000	100%	1.819.812.150	100%	2.100.000.000	100%	2.600.000.000	100%	3.000.000.000	Bagian Umum dan Perlengkapan	Kota Bukittinggi
			Penunjang Operasional dan Fasilitas Pelayanan Tata Usaha Pimpinan	Persentase kegiatan kedinasan KDH dan Wakil KDH terfasilitasi	90%	95%	0	100%	579.500.000	100%	325.921.210	100%	325.921.210	100%	375.000.000	100%	400.000.000	Bagian Umum dan Perlengkapan	Kota Bukittinggi
			Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Hari Jadi Kota Bukittinggi	Persentase pelaksanaan kegiatan KDH sesuai standar protokoler	90%	95%	455.000.000	100%	300.000.000	100%	380.000.000	100%	380.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	Bagian Umum dan Perlengkapan	Kota Bukittinggi
			Lomba Penyelenggaraan Jenazah dan Penerapan Ibadah Bagi Remaja Masjid	% Remaja Masjid Aktif	10%	10%	0	15%	29.000.000	15%	28.706.000	20%	50.000.000	25%	75.000.000	35%	80.000.000	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi
			Monitoring, Evaluasi, Verifikasi Bantuan Sosial dan Hibah	% Hibah dan Bantuan Sosial tersalurkan	60%	65%	13.000.000	65%	9.067.200	65%	8.336.305	70%	15.000.000	75%	20.000.000	80%	30.000.000	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi
			Pelatihan Garin Masjid dan Mushalla	% Garin terlatih	10%	10%	0	15%	0	15%	0	20%	45.850.000	25%	45.850.000	35%	50.000.000	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi
			Pembinaan dan Pelatihan Remaja Islam Masjid/ Mushalla	% Remaja Masjid Aktif	10%	10%	0	15%	0	15%	0	20%	95.750.000	25%	95.750.000	35%	100.000.000	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi

TUJUAN TINGKAT SKPD	SASARAN TINGKAT SKPD	INDIKATOR TINGKAT SKPD	PROGRAM/ KEGLATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPALA N PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	LOKASI
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
						TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA	TARGET	DANA		
			Monev Pemberian Beasiswa Bagi Keluarga Meskin Berprestasi	% Keluarga Miskin Berprestasi memperoleh Beasiswa	0%	0%	0	0%	0	0%	0	20%	250.000.000	20%	250.000.000	25%	260.000.000	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Kota Bukittinggi

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Sekretariat Daerah merupakan SKPD pendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah. Karena itu Sekretariat Daerah tidak menjalankan salah satu urusan, baik Urusan Wajib Maupun Urusan Pilihan. Dengan demikian Kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan pada Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi merupakan indikator terhadap pencapaian Sasaran dalam menunjang Visi dan Misi daerah seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2016-2021

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	KONDISI AKHIR
1	Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (CSR) terhadap belanja langsung APBD	Jumlah anggaran CSR/ jumlah belanja langsung APBD	1	1.5	1.75	2	2.25	2.5	2.5
2	Peringkat EKPP dan LPPD	Skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	65	55	40	35	35	30	30
3	Jumlah MoU tahun berjalan	Jumlah Mou yang sudah dibuat pada tahun berjalan	0	2	3	4	5	6	6
4	Persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah produk hukum yang sudah sesuai ketentuan perundang-undangan/ Jumlah seluruh produk hukum yang disusun pada tahun berjalan	Na	100	100	100	100	100	100
5	Persentase sarana ibadah aktif	Jumlah sarana yang aktif / jumlah sarana yang ada	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase lembaga agama yang aktif	Jumlah lembaga agama yang aktif / jumlah lembaga agama yang ada	100	100	100	100	100	100	100

7	Nilai evaluasi SAKIP Kota	Nilai evaluasi SAKIP Kota Bukittinggi yang diterbitkan oleh KemenPAN RB	C	B	BB	BB	A	A	A
8	Indeks kematangan organisasi	Hasil indeks terhadap survei kepuasan masyarakat pada seluruh SKPD penyelenggaraan pelayanan publik	30	70	75	75	80	80	
9	Persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak	Jumlah pengadaan barang dan jasa terkontrak terlaksana 100% / jumlah pengadaan barang dan jasa terkontrak	85	100	100	100	100	100	100
10	Persentase informasi yang direspon	Jumlah informasi yang direspon/informasi yang dipublish	NA	35	40	45	50	55	60
11	Persentase pewarta yang aktif memberikan informasi	Jumlah pewarta aktif/jumlah seluruh pewarta	NA	NA	100	100	100	100	100
12	Jumlah komoditas yang dikendalikan	Jumlah komoditas yang dikendalikan dikota Bukittinggi/Jumlah yang dikendalikan propinsi Sumbar	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 dibuat dan disusun agar dapat dilaksanakan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi. Rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

Terselesaikanya rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi. Terwujudnya visi dan misi tersebut diaplikasikan kedalam tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi.

Demikianlah Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 disusun, sehingga dapat memberikan manfaat bagi Kota Bukittinggi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



YUEN KARNOVA